

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Desa merupakan salah satu wilayah administrasi dalam suatu pemerintahan. Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai seni karna banyak pemimpin yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta dengan karismatik mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin suatu ilmu pengetahuan karna memenuhi syaratnya yaitu dapat dipelajari, diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun objek fomal, universal sifatnya, sistematis dan spesifik (khas). Indonesia adalah negara kesejahteraan sosial (*social welfare state*) sebagaimana dirumuskan dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Bab XIV UUD NRI Tahun 1945.<sup>1</sup>

Konsep *welfare state* ini adalah sebuah gagasan Negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Idealnya gagasan ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah social, sebagai negara berkembang masih banyak problematika kebangsaan yang dihadapi indonesia sampai saat ini, mulai dari masalah sosial, ekonomi hingga politik.

---

<sup>1</sup>Miftachul huda,2009,*Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 3

Sebagai salah satu bidang pokok permasalahan bangsa ini, perekonomian Indonesia masih berkutat dengan berbagai masalah di berbagai tingkatan wilayah, mulai dari perkotaan besar hingga wilayah pedesaan. Faktor-faktor lemahnya perekonomian ini tidak terlepas dari masalah dasar seperti, pengelolaan sumber daya alam yang belum maksimal, sumber daya manusia rendah, modal kerja, proses distribusi hingga tingkat konsumsi masyarakat yang masih rendah. Selain kurangnya organisasi ekonomi masyarakat bersifat kolektif kolegal seperti koperasi serta badan usaha yang berkomitmen memberikan kesejahteraan bersama terutama di sektor ekonomi masyarakat agraris.

Provinsi Sumatera Barat ditetapkan secara resmi sebagai provinsi berdasar Undang-Undang No 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No.19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau” (Lembaran-Negara Tahun 1957 No.75) sebagai Undang-Undang.<sup>2</sup>

Bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah Pemerintahan Nagari. Sementara itu, Nagari oleh Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari didefinisikan sebagai: “Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau

Basandi Syara' - Syara' basandi Kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat".<sup>3</sup>

Kabupaten Pasaman adalah salah satu dari 19 kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, Kabupaten Pasaman terletak pada ketinggian antara 50 meter sampai dengan 2.912 meter di atas permukaan air laut.

Kecamatan Lubuk Sikaping merupakan kecamatan keenam paling luas di Kabupaten Pasaman dengan luas daerah yaitu 346,50 KM yang terbagi atas 6 (enam) Nagari yakni Nagari Tanjung Baringin dengan luas wilayah 81,83 KM, Nagari Jambak dengan luas wilayah 63,69 Nagari Durian Tinggi dengan luas 16,35 KM, Nagari Pauh dengan luas 20,84 KM, Nagari Air Manggis dengan luas 81,99 KM, dan Nagari Sundata dengan luas 81,50 KM<sup>2</sup>. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Nagari Tanjung Baringin merupakan Nagari dengan posisi kedua paling luas di Kecamatan Lubuk Sikaping dengan Jumlah penduduk 9.414 Orang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan desa tidak sekedar sebagai suatu objek pembangunan tetapi menjadikan desa sebagai pelaku pembangunan sebagai upaya peningkatan kualitas dan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, desa perlu menerapkan berbagai strategi sehingga alokasi, potensi serta sumber daya di desa

---

<sup>3</sup>Siswanto Sunarno, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123

dapat disederhanakan untuk mendukung realisasi pembangunan desa dan peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat desa.<sup>4</sup> UU Desa dalam rangka pembangunan. Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>5</sup> Ada lima tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa yaitu :

1. Peningkatan kemampuan keuangan desa;
2. Pengembangan usaha masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan;
3. Mendorong tumbuhnya usaha masyarakat;
4. Penyedia jaminan sosial;
5. Penyedia pelayanan bagi masyarakat desa.

Di Provinsi Sumatera Barat, adanya Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari menjelaskan bahwa pemerintahan terendah berada pada Nagari. Pada Pasal 1 menjelaskan Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan / atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

---

<sup>4</sup> Busyra Azheri ,Upita Anggun Sari,2018, *The Anomaly of the Village Government in Establishing Village Owned Enterprise*, Hasanudin Law Review Vol.4 Issue 2, hlm. 257

<sup>5</sup> Arif Ahmad Risadi,2012, *Badan Usaha Milik Desa*, Dapur Buku,Jakarta, hlm. 4

Melihat Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) hari ini tidak ubahnya sebuah badan usaha pemodal yang hanya mementingkan nilai pendapatan dan seremonial sebagai pelengkap dari sebuah bagian dari masyarakat Nagari. Karena pada pelaksanaan tata kelola BUMDes hanya melibatkan para pengusaha yang memiliki kedekatan emosional politik dan golongan dengan desa, setidaknya ini fakta lapangan di kabupaten pasaman, banyak faktor membuat BUMDes tidak berjalan sesuai idealnya tujuan didirikannya BUMDes diantaranya, lemahnya daya saing produk Nagari, tidak atau belum paham nya pengelolaan dan penjelasan mekanisme BUMNag yang baik di Nagari-nagari di kabupaten pasaman, selain faktor dari pemerintah Kabupaten pasaman dalam memberikan perhatian lebih kepada ekonomi kerakyatan akar rumput layaknya BUMNag.

Sejak pertama kali Dana Desa diluncurkan di kabupaten pasaman tahun 2015 sampai saat ini masih banyak BUMNag yang belum memberikan kontribusi berarti kepada masyarakat, bahkan masih banyak badan usaha milik Nagari ini yang mengalami berbagai problematika internal dan eksternal. Malah tidak sedikit BUMNag di daerah itu tutup karena berbagai persoalan dialami. Mulai dari berhentinya kepengurusan, modal habis, rendahnya SDM serta kurangnya pemahaman perangkat Nagari terhadap pengelolaan BUMNag. Sejumlah BUMNag dari total 37 BUMNag di Kabupaten Pasaman, dililit sejumlah persoalan. Mulai dari kepengurusan yang mundur, kabur, ganti pengurus baru, BUMNag ada, tapi pengurusnya masih kosong serta tutup tanpa sebab.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup><https://www.harianhaluan.com/sumbar/pr-10210234>, Yudi, 2019, "[bumnag-pasaman-masih-jauh-dari-harapan](#)", Diakses Kamis, 25 Agustus 2022 Pukul 23.30 WIB.

Adapun beberapa Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Kabupaten Pasaman yang vakum dan tidak memberikan kontribusi berarti kepada Pendapatan Asli Nagari (PAN) seperti di Nagari Pintu Padang, Mapat Tunggul, BUMNag Kandang Kopuh Nan Limo, Nagari Langang, Rao Utara, BUMNag Baringin Jaya, Nagari Tanjung Baringin di Lubuk Sikaping, BUMNag Peto Syarif (TIB) Nagari Ganggo Hilia dan BUMNag Limo Koto Jaya, Nagari Limo Koto di Bonjol serta BUMNag Tuah Sakato, Nagari Sontang Cubadak, BUMNag Kampuang Nan Sembilan, Nagari Sitombol serta sederet BUMNag lainnya. Meskipun demikian belum ada upaya rekonstruksi ataupun semacam gagasan kebijakan baik dari pemerintahan tingkat kabupaten maupun provinsi dalam memberikan *problem solving* kepada BUMNag-bumnag terkait, dengan manfaat dan idealnya kontribusi BUMNag kepada nagari khususnya upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan sudah seharusnya perhatian kepada BUMNag juga ditingkatkan.

Rata-rata badan usaha milik Nagari di Kabupaten Pasaman tidak berjalan sesuai gagasan dan tujuan berdirinya BUMDes, ada beberapa BUMNag yang berkembang dan memberikan dampak berarti kepada ekonomi kerakyatan, baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) mengurangi angka pengangguran, menekan angka kemiskinan hingga memberdayakan dan mempersatukan pemuda Nagari atau desa salah satunya adalah BUMNag Tanjung Baringin.

BUMNag Nagari Tanjung Baringin mulai beroperasi pada tahun 2020 di tengah pandemi, disaat Nagari dan pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman

tengah disibukkan perihal problematika COVID-19 di waktu ini pula eksekusi kebijakan BUMNag Nagari ini digalakkan, badan usaha ini dipimpin dan diberdayakan oleh pemuda Tanjuang Baringin bergerak di bidang budidaya perikanan air tawar berupa, ternak ikan lele dan ternak lobster air tawar. Sesuai dengan demografi Kabupaten Pasaman yang sejuk karena secara geografis Kabupaten Pasaman dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada pada 0-55' LU s/d 0-06' LS dan 99-45' s/d 100-21' BT.<sup>7</sup> Selain sesuai dengan alam juga memanfaatkan potensi alam Tanjuang Baringin yakni bentang alam berupa sumber pengairan jernih dari pegunungan bukit barisan yang terbentang hampir di semua wilayah Kecamatan Lubuk Sikaping.

Di Kabupaten Pasaman sendiri terkhusus Nagari Tanjuang Baringin Utara proses pertumbuhan ekonomi yang lambat menjadi salah satu hal yang menyebabkan lemahnya daya saing pemuda dan usia produktif, selain dikarenakan SDM tidak terlalu memadai untuk bersaing juga akibat dari dampak sosial kenakalan remaja. Faktor kenakalan remaja merupakan salah satu hal penyebab tingginya angka pengangguran serta masalah ekonomi, sosial dan politik di sana seperti dilansir dari penelitian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) penyebab kenakalan remaja di Kabupaten Pasaman, yaitu: kurangnya perhatian dan pendidikan agama oleh keluarga, pengaruh lingkungan yang tidak

---

<sup>7</sup><https://www.pasamankab.go.id/halaman/>, Alius Abrianta, 2021, "letak-geografis-kabupaten-pasaman Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, Diakses Kamis, 25 Agustus 2022 Pukul 21.00

baik, tekanan psikologis yang dialami remaja, gagal dalam pendidikan, peranan media massa dan perkembangan teknologi modern<sup>8</sup>.

Fakta sosial tersebut tentunya menjadi keresahan bersama yang harus ditemukan solusinya, agar bagaimana pelaku masalah sosial seperti tawuran, kenakalan remaja, tindak pencurian dan segenap problematika sosial diberdayakan menjadi sumberdaya manusia berguna negara. andil pemerintah dalam hal ini adalah kebijakan meskipun selama ini terkhusus di Kabupaten Pasaman wadah pemberdayaan pemuda semacam ini belumlah terlalu menjadi fokus kebijakan daerah nya. Berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat tentang apa yang diinginkan dan bisa dilakukan masyarakat yang bersifat membangun kemandirian dan kreativitas masyarakat itu sendiri.<sup>9</sup> Kebijakan pro serta melibatkan masyarakat banyak terkhusus pemuda inilah yang dibutuhkan oleh daerah Kabupaten Pasaman hari ini bukan hanya sekedar eksistensi tetapi suatu hal amat konstruktif dalam upaya membangun Nagari kedepannya.

Pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah cara yang dilakukan dalam proses pengentasan kemiskinan, agar masyarakat berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu mengambil sebuah keputusan untuk dirinya sendiri maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Adapun seseorang yang

---

<sup>8</sup>Yusmiarni,2018 “Kenakalan Remaja Di Kabupaten Pasaman Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum”,( STIH Lubuk Sikaping Yappas)

<sup>9</sup>I Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Radana,2018,”Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan masyarakat dan penanggungan Pengangguran di Desa Tejakula,Kecamatan Tejakula”(Denpasar:Locus Majalah Fisip),hlm.52

telah berdaya, mereka akan mampu terlepas dari jeratan kemiskinan yang menghantui mereka selama ini. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat akan lebih percaya diri terhadap keputusan-keputusan yang mereka ambil untuk memulai sebuah kegiatan yang masyarakat itu tekuni dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun kehidupan kelompok sosial masyarakat.<sup>10</sup>

Tidak berjalannya beberapa wadah yang seharusnya bisa menjadi tempat pembinaan potensi pemuda termasuk BUMNag menjadikan kian rumitnya masalah pemberdayaan generasi muda di Kabupaten dengan indeks pembangunan manusia terendah nomor dua terendah di Provinsi Sumatera Barat. Jika di pandang beberapa faktor, pertama tidak tersedianya lapangan pekerjaan bersifat tetap dan berkelanjutan selain dari pada tenaga honorer dan pekerjaan lainnya di instansi pemerintahan kabupaten pasaman, banyaknya lapangan pekerjaan musiman seperti buruh tani, kuli bangunan, perdagangan barang hingga pada acara acara adat tertentu sehingga jumlah pengangguran bertingkat seiring dengan waktu, kedua kurangnya sentuhan pemerintah daerah dari tingkatan provinsi, kabupaten hingga struktural terendah yakni pemerintahan nagari dalam hal ini, jika ditolak ukuran dari produk kebijakan publik yang dikeluarkan, memang tidak semuanya gagal tetapi yang sifatnya visioner dan benar benar menysasar akar rumput dari masalah utama pengangguran yakni lapangan kerja belum ada dan minim sekali, sejauh ini di Kabupaten Pasaman, banyak peraturan publik hanya

---

<sup>10</sup> Sri Koeswanto W,2014, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menyulam Pada Ibu-Ibu di Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor", *Jurnal Sarwahita*

berkutat pada pengesahan dan *refocusing* anggaran daerah, artinya pemerintahan gagap dan tidak cakap dalam membuat suatu terobosan *problem solving* dari problematika yang ada.

Hal inilah yang membuat BUMNag Tanjung Baringin patut dijadikan sebagai wadah percontohan oleh BUMNag lainnya di Kabupaten Pasaman, selain berorientasi kepada Pendapatan Asli Nagari (PAN) secara ekonomi juga sebagai wadah generasi pemberdayaan pemuda Nagari Tanjung Baringin dalam mengembangkan potensinya di bidang wirausaha, menjadi tangkal kenakalan remaja bahkan menekan angka kriminal di daerah Tanjung Baringin Utara, juga tentunya melestarikan kearifan lokal daerah yang ada.

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian Annisa Safitri berjudul “Efektivitas Badan Usaha Milik Nagari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari di Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Usaha Milik Nagari Ketaping dalam hal ini belum memberikan kontribusi pada pendapatan asli Nagari nya, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut dan umum nya, indikator-indikator penyebab tersebut merupakan rata rata problematika BUMNag di Sumatera Barat, diantaranya pemberian sosialisasi yang tidak menyeluruh oleh pihak Wali Nagari mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Badan Usaha yang seharusnya dikelola secara bersama sehingga

dapat mencapai keberhasilan yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat dan Nagari, kurangnya pemanfaatan lahan sewa oleh pengelola Badan Usaha Milik Nagari sehingga menjadi terbengkalai. Kemacetan pada usaha BUMNag sehingga kegiatan operasional diberhentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.<sup>11</sup>

Penelitian Ori Akde Kapanta, dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Perekonomian Desa Studi Kasus Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik atau metode pengumpulan data dengan cara angket (kuisioner) serta dokumentasi, penulis menggunakan skala likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi, sampel atau responden tentang peran BUMDes terhadap Perekonomian desa. Tujuan penelitian ini adalah melihat sejauh mana secara kuantitas peran Badan Usaha Milik Desa Orong Bawa memberikan dampak terhadap perekonomian desa tersebut secara kompleks.<sup>12</sup>

Penelitian Lia Khoilatul Arifah, dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pakan Cipta Waras, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021”. Metode penelitian

---

<sup>11</sup> Anisa Safitri dan Jumiati, 2020 “Efektivitas Badan Usaha Milik Nagari dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari di Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman” Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

<sup>12</sup> Ori Akde Kapanta, 2020 “Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Perekonomian Desa Studi Kasus Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa” skripsi Administrasi bisnis Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

kualitatif Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara observasi dan dokumentasi lapangan. Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pekon Cipta Waras, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat haruslah diawali dengan menyadarkan masyarakat terhadap fungsi BUMDes itu sendiri.<sup>13</sup>

Dari hasil penelitian tersebut, yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti lebih memfokuskan pada peran kearifan serta menjadikan BUMNag Tanjung Baringin sebagai *role model* bagaimana BUMNag mendedikasikan diri sebagai wadah bagi para pemuda desa yang dalam usia produktif.

Permasalahan ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana dan apa sejauh ini kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Tanjung Baringin dalam menjalankan Badan Usaha Milik Nagari tersebut, sehingga tujuan BUMNag tidak hanya sebagai formalitas pemerintahan nagari atau sebagaimana badan usaha pada umumnya, tetapi lebih jauh bagaimana sebuah badan usaha dikelola dan didedikasikan untuk mewadahi potensi-potensi alam dan menyiapkan *entrepreneur* muda yang sebelumnya lahir dari banyak latar belakang terutama pendidikan dan ekonomi. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut yang dirangkum dalam skripsi yang berjudul **“Peran**

---

<sup>13</sup> Lia Khoilatul Arifah, 2021 “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Wadah Badan Usaha Milik desa (BUMDes) di Pekan Cipta Waras, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung barat*” skripsi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Raden Intan

**Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Tanjung Baringin dalam Pemberdayaan Pemuda di Nagari Tanjung Baringin Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran BUMNag Tanjung Baringin terhadap pemberdayaan pemuda Nagari Tanjung Baringin Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana langkah pemerintahan Nagari Tanjung Baringin Utara dalam memberdayakan pemuda melalui BUMNag?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran BUMNag Tanjung Baringin terhadap pemberdayaan pemuda Nagari Tanjung Baringin Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja langkah pemerintahan Nagari Tanjung Baringin Utara dalam memberdayakan pemuda melalui BUMNag.

### **1.4 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada akademisi maupun jurusan ilmu pemerintahan tentang bagaimana peran BUMNag Tanjung Baringin dalam pemberdayaan pemuda.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini dan menambah wawasan bagi para pembaca. Serta diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

### 1.5 Landasan Teori

#### 1.5.1 Teori Peran

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>14</sup>

Peran merupakan bentuk tanggung jawab yang berhubungan dengan posisi, kapasitas, fungsi dan wewenang seseorang atau kumpulan individu. Teori peran (*Role Theory*) menurut perspektif sosiologi dan psikologi sosial meyakini bahwa sebagian aktivitas sehari-hari sebagai pemeran dalam kategori sosial. Menurut teori ini, dalam interaksi sosial masyarakat telah mengatur peran dan cara setiap individu dalam bekerjasama. Park menerangkan bahwa dampak

---

<sup>14</sup> Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi* (Bandung: Alfabeta, 2014). hlm. 86

masyarakat pada perilaku yang berkaitan dengan peran kita, tetapi sebelum seorang antropolog Robert Linton mengembangkan teori peran beberapa waktu lalu. Teori peran mengungkapkan interaksi sosial tergantung pada penghibur yang bermain seperti yang ditunjukkan oleh definisi sosial. Berdasarkan teori ini, adanya harapan peran yaitu pemahaman antar satu sama lain yang dapat mengarahkan kita dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari.<sup>15</sup>

Untuk mencapai suatu tujuan dibutuhkan peran- peran didalamnya, sesuai dengan teori peran Jim Ife dan Tesoriero jenis-jenis peran sebagai berikut:

### **1. Peran Sebagai Fasilitator**

Menurut Ife dalam buku kutipan Isbandi Rukminto, terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

#### **1. Animasi sosial**

Menurut Ife, keterampilan melakukan animasi sosial menggambarkan kapasitas pelaku pemberdaya masyarakat untuk menghasilkan energi, inspirasi, semangat masyarakat, termasuk mewujudkan inspirasi untuk melakukan sesuatu.

#### **2. Mediasi dan negosiasi**

Upaya dalam melakukan perubahan sosial yang direncanakan seringkali mengalami kondisi dimana terdapat masalah minat dan nilai dalam kelompok. Seorang pemberdaya masyarakat harus melakukan intervensi kapasitas untuk menghubungkan komunitas yang sedang

---

<sup>15</sup> Suharsono, E. (2016). *Teori Peran konsep, deviasi, dan implikasinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

<sup>16</sup> Rukminto, A. I. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

konflik. Mediator diperlukan sebagai negosiator karena berada ditengah-tengah kelompok yang sedang konflik.

### 3. Pemberi dukungan

Pemberdayaan masyarakat tidak lepas adanya dukungan masyarakat yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas untuk mengembangkan wilayah tersebut. Dukungan itu tidak hanya berbentuk material, tetapi juga berbentuk pujian<sup>17</sup>

### 4. Fasilitasi Kelompok

Menurut Ife menjelaskan bahwa pelaku menggunakan waktu untuk melakukan perubahan yang dihabiskan pada kelompok dimasyarakat. Maka, keaktifan kerja dari pelaku perubahan untuk memberdayakan masyarakat akan berhubungan dengan kemampuan bekerjasama dengan komunitas kecil.

### 5. Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan

Pemberdayaan masyarakat dilakukan pelaku dengan mengenali dan menggunakan kemampuan dan sumber daya yang ada dikomunitas maupun kelompok.

### 6. Mengorganisasi

Peran ini dimaksudkan pelaku perubahan pemberdaya masyarakat sesuai dengan peran fasilitatif yaitu organisator. Keterampilan dalam berorganisasi tidak lepas dari pelaku perubahan untuk melakukan halhal yang harus dijalankan.

---

<sup>17</sup> Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

## 2. Peran Sebagai Pendidik

Peran fasilitatif terlibat dalam pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat dan mendukung langkah-langkah masyarakat, sehingga membutuhkan pemberdaya untuk lebih aktif dalam perencanaan. Selain melaksanakan, pemberdaya masyarakat juga berperan aktif memberikan saran langsung, karena informasi, kemampuan dan pengalaman.<sup>18</sup>

### 1. Peningkatan Kesadaran

Upaya untuk membangun hubungan antar kepentingan individual dengan kepentingan struktural diawali dengan meningkatkan kesadaran. Hal ini ditujukan untuk membantu individu mengatasi konflik, pencapaian, harapan, halangan sebagai pandangan sosial dan politik lebih luas. Permasalahan yang bersifat individu dengan struktur sosial maupun politik sering menimbulkan ketidakberdayaan, maka hal tersebut dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut masyarakat berupaya menjalin hubungan antara satu dan lainnya, maka akan timbulnya kesadaran masyarakat

### 2. Pemberian informasi

Upaya memberdayakan masyarakat yang dilakukan pelaku seringkali juga harus memberikan informasi yang mungkin belum diketahui oleh kelompok sasaran. Salah satu peran penting pelaku perubahan adalah menyampaikan informasi yang relevan kepada masyarakat.

### 3. Pelatihan

Pelatihan dapat diartikan peran pendidikan yang penting karena pada

---

<sup>18</sup> Huraerah, A. (2008). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.

dasarnya mengacu pada upaya mengarahkan kelompok yang dituju bagaimana melaksanakan strategi yang bermanfaat bagi masyarakat maupun kelompok tersebut.

### **3. Peran Representasi**

Peran pemberdayaan masyarakat melakukan interkasi dengan orang luar harus menggunakan peran-peran representasi untuk menunjukkan adanya peran demi kepentingan masyarakat. Banyak hal dilakukan pemberdaya masyarakat yang fokus pada masyarakat, seorang pemberdaya masyarakat tidak lepas kaitannya dengan sistem lebih luas yang bersifat penting. Peran representasi ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Sumber daya yang diperoleh**

Untuk mendapatkan data, kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan masyarakat pemberdayaan, mereka harus memiliki struktur dan menemukan tujuan sendiri. Dengan memperoleh akar untuk dipertimbangkan dengan matang, seperti bantuan modal usaha, mempersiapkan peningkatan pelatihan potensi dan manfaat dari berbagai donator.

#### **2. Peran Advokasi**

Pemberdayaan masyarakat akan melaksanakan peran advokasi untuk kepentingan kelompok pada masyarakat tersebut. Pemberdaya masyarakat menangani berbagai hal penting individu, kelompok di daerah tersebut. Advokasi dilakukan guna menjaga kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat, seperti mendorong upaya implementasi serta melaksanakan program.

### 3. Menggunakan Media

Dalam memberdayakan masyarakat dari banyaknya kejadian tidak lepas dari penggunaan media. Karena hal ini dapat memperjelas hal khusus dan untuk membantu mereka dalam memasukkan rencana umum. Media massa dimanfaatkan untuk mempublikasikan hasil dan bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang lain

### 4. Peran Teknis

Seorang pendamping masyarakat harus mempunyai keterampilan atau keahlian. Seorang pekerja masyarakat juga melibatkan orang lain dalam berbagai proses teknis dengan sebanyak mungkin.

#### 1. Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang telah didapatkan dari hasil penelitian kemudian dikumpulkan dan dilakukan analisis lebih mendalam, hal ini dikategorikan sebagai peran meneliti dengan menggunakan metodologi yang sesuai.

#### 2. Menggunakan Komputer

Berkembangnya teknologi perlu diimbangi dengan adaptasi dan belajar menggunakan perangkat-perangkat sehari-hari, seperti computer yang selalu dibutuhkan untuk mengolah data menggunakan fitur-fitur didalamnya. Penggunaan computer sangat membantu dalam menunjang kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan.

#### 3. Persentasi Verbal dan Tertulis

Kemampuan untuk melakukan presentasi sangatlah penting dalam menyampaikan ide ataupun gagasan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berpengaruh dalam

proses pemberdayaan. dalam melakukan presentasi bisa juga dengan cara secara tertulis melalui laporan yang bersifat komunikatif.

#### 4. Mengontrol dan Mengelola Keuangan

Pelaku perubahan dapat berperan dalam pencatatan finansial, pengawasan pertanggungjawaban pengeluaran, mengawasi anggaran dan pengawasan-pengawasan lain yang berhubungan dengan finansial

### **1.5.2 Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)**

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan BUMNag yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMNag didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pendiriannya dibangun atas prakarsa masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, *akuntabel* dan *sustainable* dengan mekanisme berbasis anggota dan pengusahaan mandiri. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMNag harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam Pengolahan BUMNag sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Pembentukan BUMNag ini sangat penting dan bermanfaat sekali bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf

perekonomian mereka. BUMDes/BUMNag ini merupakan jawaban dari Pasal 33 UUD 1945. BUMNag diharapkan dapat menjadi pilar kesejahteraan bangsa, karena BUMDes/BUMNag tidak lain merupakan usaha didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat bawah, masyarakat akar rumput, yaitu masyarakat desa/nagari, untuk saling bekerja sama, bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat.<sup>19</sup>

### 1.5.3 Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup di dalam kehidupan masyarakat serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok yang secara sosial kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara ekonomi karena masalah kemiskinan.<sup>20</sup>

Menurut Noor, Pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan potensi diri dan lingkungannya secara mandiri.<sup>21</sup> Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu upaya membantu individu atau kelompok dalam mengembangkan kemampuan mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan mampu meningkatkan taraf hidupnya.

---

<sup>19</sup> Hendri Andi Mesta, Yolandafitri Zulvia, 2018, *Jurnal Sembada Penerbit PKN STAN Politeknik Keuangan Negara, Jakarta*

<sup>20</sup> Edi Suharto, 2017, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, hlm. 59-60.

<sup>21</sup> Ristiana Ristiana, Amir Yusuf, 2020, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep* Journal of Nonformal Education and Community .hlm 91

Menurut beberapa ahli dalam buku Edi Suharto mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Person bahwa pemberdayaan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses dimana seseorang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan pengontrolan yang mempengaruhi terhadap kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses untuk membuat seseorang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>22</sup>

Bukan hanya ditujukan pada perseorangan tetapi Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan secara berkelompok, dimana masyarakat dalam kegiatan ini sebagai bagian dari aktualisasi eksistensi manusia dalam berkehidupan bermasyarakat untuk lebih *survive* lagi baik dalam membangun masyarakat secara menyeluruh dalam mensejahterakan masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut Aristanto terdapat beberapa bentuk-bentuk pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara berkala, komprehensif, hingga batas tercapainya keseimbangan antara pemerintah dan seluruh lapisan yang diperintah.<sup>24</sup> Berikut bentuk-bentuk pemberdayaan, antara lain:

---

<sup>22</sup>Edi Suharto, 2017, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 57.

<sup>23</sup> Hendrawati Hamid, 2018, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, hlm. 11

<sup>24</sup> Aristanto, A. (2018). *Bentuk-bentuk Pemberdayaan Masyarakat*.

## **1. Pemberdayaan Ekonomi**

Pemberdayaan ekonomi adalah bentuk program pemberdayaan yang menitikberatkan pada usaha memberdayakan ekonomi masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat diperlukan suatu pendekatan. Adapun pendekatan dalam pemberdayaan ekonomi ini, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan yaitu :

- a. Harus terarah dan ditujukan langsung kepada yang membutuhkan.
- b. Harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
- c. Melalui pendekatan kelompok yang merupakan metode paling efektif sehingga penggunaan sumber daya lebih efisien. Pemberdayaan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan mereka yang diperintah untuk menanggung dampak negatif pertumbuhan, pembayaran resiko salah urus, menanggung beban pembangunan, kegagalan rencana dan kerusakan lingkungan.

## **2. Pemberdayaan Pendidikan**

Pemberdayaan pendidikan dapat dikatakan esensi dari pendidikan itu sendiri, pendidikan termasuk pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal adalah upaya untuk memberdayakan manusia untuk mengembangkan bakatnya sendiri. Melalui pendidikan atau pembelajaran kemampuan yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan masyarakat dapat diupayakan agar seluruh masyarakat yang ada dapat meningkatkan kemampuannya sendiri melalui pendidikan pendidikan. Terdapat lima prinsip yang mendasari hal tersebut antara lain:

1. Kepedulian terhadap masalah, kebutuhan dan potensi/sumberdaya masyarakat.
2. Kepercayaan bersama dari pelayan program dan dari masyarakat pemilik program.
3. Bantuan (pemerintah) dalam membantu masyarakat dalam berbagai berbagai kegiatan.
4. Dukungan, yaitu upaya mengikutsertakan seluruh komponen dalam proses kegiatan.
5. Mengayomi peranan masyarakat dan hasil yang dicapai.

### **3. Pemberdayaan Politik**

Dalam konteks politik, pemberdayaan politik masyarakat adalah membangun kesadaran kolektif masyarakat sehingga standar kepemimpinan lokal dapat dibangun yang menurut masyarakat akan mendorong untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat saat ini. Pemberdayaan politik masyarakat memiliki beberapa peran utama yaitu partai politik, pemerintah dan masyarakat sipil (civil society). Tujuan pemberdayaan politik adalah untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position) yang dikelola oleh pemerintah. Tujuannya agar orang yang diperintahkan mendapatkan haknya berupa barang, jasa dan perawatan tanpa merugikan pihak lain.

### **4. Pemberdayaan Sosial-Budaya**

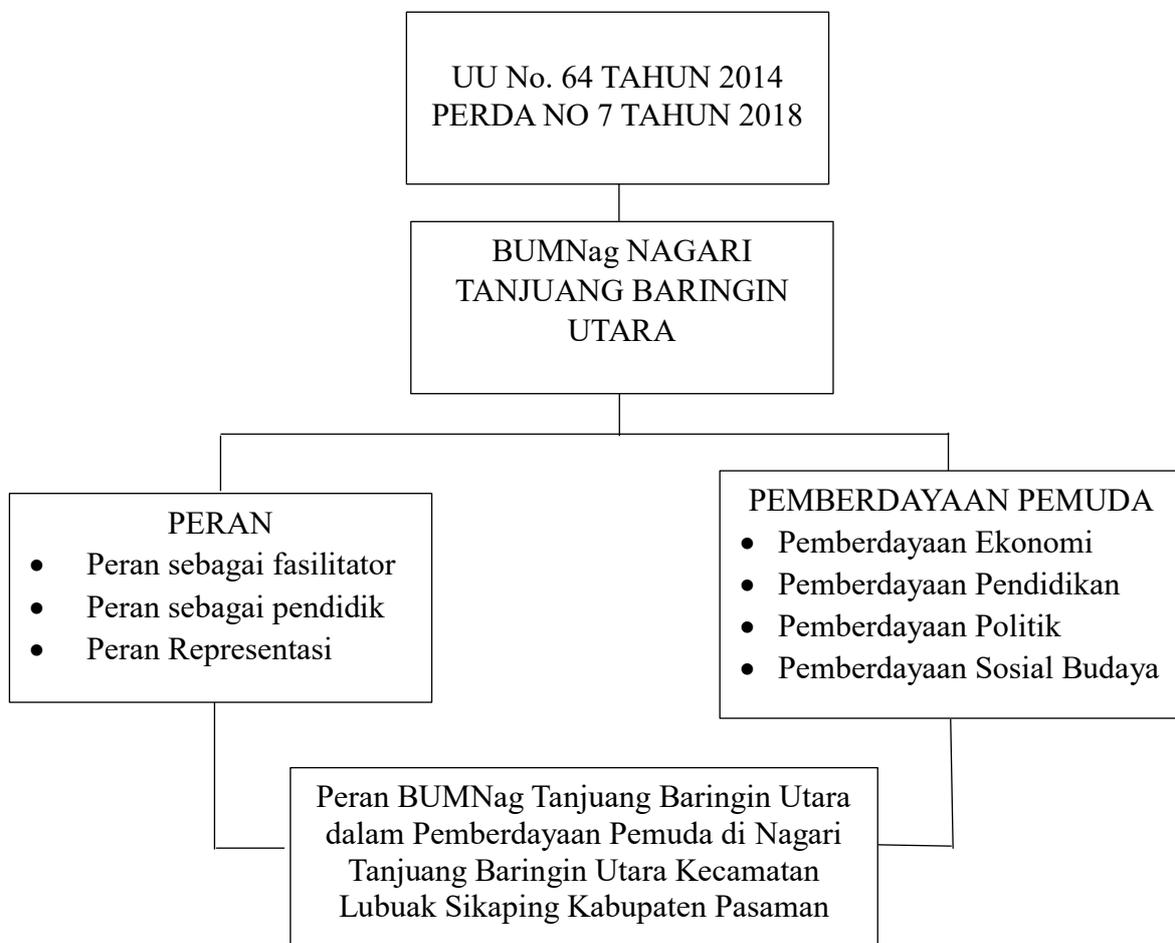
Dalam konteks pemberdayaan sosial-budaya adalah bagaimana program atau kegiatan bagi masyarakat untuk berkembang melalui pelestarian budaya. Pemberdayaan sosial-budaya ditujukan untuk memperluas batas sumber daya

manusia melalui investasi sumber daya manusia (human investmen) untuk membangun nilai manusia pemanfaatan dan pengakuan yang adil terhadap manusia.

Pengembangan masyarakat sangat berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat sehingga keduanya tidak dapat terpisahkan. Pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat merupakan pilihan strategi dalam konteks pembangunan alternatif yang mengutamakan pada pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (*Community Based Development*), bersifat bottom up dan lokalitas. Pengembangan masyarakat merupakan proses dan langkah pertama yang dilalui serta diupayakan menuju proses pemberdayaan masyarakat. Pengembangan masyarakat merupakan upaya memberdayakan masyarakat yang lemah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan untuk mengubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Masyarakat yang lemah merupakan masyarakat yang tidak mempunyai daya dan miskin karena tidak memiliki sumber daya dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatur fasilitas-fasilitas produksi. Mereka umumnya terdiri atas kaum buruh, petani penggarap, kalangan pengangguran, orang-orang cacat atau orang yang dibuat marginal karena umur, keadaan gender, ras dan etnis. Kegiatan pengembangan masyarakat ditekankan pada upaya membantu orang-orang yang tidak berdaya namun memiliki keinginan untuk bekerja sama dalam kelompok, melakukan pemahaman

terhadap kebutuhan dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>25</sup>

### 1.6 Kerangka Berpikir



### 1.7 Metode Penelitian

Penelitian merupakan proses pemecahan suatu masalah dengan melakukan suatu pendekatan dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara sistematis. Hasil dari penelitian dilakukan nantinya adalah teori baru

---

<sup>25</sup> Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Media Group.

yang berkaitan dengan masalah sedang dikaji atau kesimpulan dari dugaan-dugaan yang telah dibuat sebelumnya.

Kegiatan Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang diajukan (umumnya disajikan dalam bentuk pertanyaan pertanyaan penelitian) yang dirumuskan dalam sub bab rumusan masalah atau fokus penelitian. Berdasar identifikasi pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut, sesungguhnya peneliti dapat dengan mudah untuk menentukan desain penelitian yang digunakan, sebab dari hasil identifikasi setidaknya akan ditemukan ciri-ciri dari karakteristik pendekatan penelitian, jenis penelitian, perlu tidaknya peneliti masuk atau hadir dalam kancah penelitian, teknik pengumpulan data yang dibutuhkan sampai analisis data yang diperlukan.<sup>26</sup>

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan proses pemecahan suatu masalah dengan melakukan suatu pendekatan dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara sistematis. Hasil dari penelitian dilakukan nantinya adalah teori baru yang berkaitan dengan masalah sedang dikaji atau kesimpulan dari dugaan-dugaan yang telah dibuat sebelumnya.

Kegiatan Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang diajukan (umumnya disajikan dalam bentuk pertanyaan pertanyaan penelitian) yang dirumuskan dalam sub bab rumusan masalah atau fokus penelitian. Berdasar identifikasi pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut,

---

<sup>26</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Penerbit Alfabeta), hlm. 15

sesungguhnya peneliti dapat dengan mudah untuk menentukan desain penelitian yang digunakan, sebab dari hasil identifikasi setidaknya akan ditemukan ciri-ciri dari karakteristik pendekatan penelitian, jenis penelitian, perlu tidaknya peneliti masuk atau hadir dalam kancah penelitian, teknik pengumpulan data yang dibutuhkan sampai analisis data yang diperlukan.<sup>27</sup>

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang penulis memutuskan untuk melakukan penelitian pada BUMNag Nagari Tanjung Baringin dan Nagari Tanjung Baringin Utara. Lokasi dipilih dikarenakan BUMNag dan Pemerintahan Nagari Tanjung Baringin Utara merupakan pelaku dari kebijakan BUMNag yang saat ini berlaku, jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya daerah ini masih terdapat banyak problematika seperti kurangnya peranan BUMNag dalam memberdayakan sumber daya manusia daerahnya terutama pemudanya.

### **1.7.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini di maksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih data mana yang *relevan* dan tidak *relevan* dengan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada peran BUMNag Nagari Tanjung Baringin dalam pemberdayaan pemuda di Nagari Tanjung Baringin Utara Kecamatan Lubuak Sikaping Kabupaten Pasaman.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Penerbit Alfabeta), hlm. 15

#### 1.7.4 Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

##### a. Data Primer

Untuk mencapai sebuah kesimpulan, penelitian yang akan dilakukan membutuhkan sumber informasi disebut dengan data. Data adalah fakta atau gambaran nantinya akan dikumpulkan oleh para peneliti untuk diolah sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi penelitian tersebut. Informasi inilah yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan.<sup>28</sup>

Dalam hal ini peneliti mencari dan mengumpulkan data yang langsung berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian yaitu wawancara dengan Pemerintahan Nagari Tanjung Baringin, Nagari Persiapan Tanjung Baringin utara, direktur beserta jajaran BUMNag Nagari Tanjung Baringin serta beberapa pemuda Nagari Tanjung Baringin Utara.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>29</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah

---

<sup>28</sup> Ibid. hlm. 17

<sup>29</sup> Sumadi Suryabrata, 2012, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).  
hlm. 39

dokumen-dokumen, baik berupa dokumen resmi Kantor Nagari Tanjung Baringin, Tanjung Baringin utara,. Dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian baik secara nasional, catatan-catatan penunjang, literatur, buku-buku perpustakaan, dokumentasi, arsip-arsip dan keterangan- keterangan lainnya.

### 1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang mengetahui permasalahan akan dikaji serta mampu memberikan informasi dan dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>30</sup> Dalam teknik *purposive sampling* peneliti memilih subjek penelitian dengan tujuan untuk menentukan informan kunci (*key informan*) sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan secara sengaja tanpa dibuat-buat

---

<sup>30</sup> Sugiyono,2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta), hlm. 219

untuk mendapatkan kekuatan akurasi. Sedangkan untuk menambah kredibilitas data, peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling* yang mana bertujuan untuk mengembangkan informasi dari informan telah ditentukan. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik yaitu *purposive sampling*.<sup>31</sup>

Berdasarkan kedua teknik tersebut, maka informan dianggap penting oleh peneliti sebagai sumber data untuk penelitian ini dan yang akan menjadi informan yang relevan pada penelitian yaitu pada Tabel 1 mengenai daftar informan penelitian.

**Tabel.1 Daftar Nama Informan Penelitian**

No.	Narasumber	Jumlah (Orang)
1.	Wali Nagari Tanjuang Baringin	1
2.	Wali Nagari Persiapan Tanjuang Baringin Utara	1
3.	Direktur BUMNag Nagari Tanjuang Baringin dan Jajaran	4
4.	Pemuda-Pemudi Nagari Tanjuang Baringin Utara yang telah dipersiapkan untuk BUMNag	10

#### 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Djam'an dan Aan Komariah, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), Cetakan ke 6. hlm. 40

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>32</sup> Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Riyanto observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>33</sup>

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara..<sup>34</sup>

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan metode wawancara ini terbagi menjadi dua jenis yaitu, wawancara terstruktur dalam mengumpulkan data penelitian yang bisa dipergunakan dengan terstruktur dimana keduanya dapat digunakan sesuai dengan keadaan penelitian.<sup>35</sup> Teknik pengumpulan data akan dilakukan pada

---

<sup>32</sup> S. Margono, 2007, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta). hlm. 158

<sup>33</sup> Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras). hlm. 58

<sup>34</sup> Burhan Bungin, 2009, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana), hlm. 126

<sup>35</sup> Muri Yusuf, 2014 “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian gabungan*” Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana). hlm. 380

penelitian ini merupakan wawancara secara tidak terstruktur atau terbuka. Maksudnya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara tersusun melainkan hanya berupa pertanyaan secara garis-garis besar permasalahan.

### c. Dokumentasi

Selain wawancara, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dokumentasi berasal dari kata dokumen berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan dengan mencatat data data yang sudah ada.<sup>36</sup> Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa lampau secara historis. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum hukum dan lainya seperti foto, video, koran, majalah, berhubungan dengan objek penelitian.

#### 1.7.7 Teknis Analisis Data

Model analisis data kualitatif ini terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi data. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

---

<sup>36</sup> Irina dan Risty Kawasati, 2021, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, (Sorong :Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

a. Reduksi data

Mereduksi data sama hal dengan kegiatan merangkum, memilah hal hal pokok yang menjadi fokusnya, mencari tema dan polanya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik memberikan kode pada aspek aspek tertentu. Kegiatan reduksi data dilakukan untuk memberikan gambaran jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan .<sup>37</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data, peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan kategori. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami persoalan di lapangan, dan merencanakan pekerjaan selanjutnya.<sup>38</sup>

Cara peneliti dalam menyajikan data adalah dengan menggunakan bagan dan teks naratif. Menggunakan bagan dapat memperjelas pola data data, diperoleh baik primer maupun sekunder. Sementara teks naratif digunakan untuk penggambaran singkat mengenai bentuk bagan yang telah dibuat.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum turun kelapangan. Kesimpulan awal ini bersifat sementara, dan

---

<sup>37</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta). hlm. 247

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 249

akan berubah apabila pada saat turun kelapangan tidak mendapatkan bukti-bukti pendukung data sebelumnya. Disinilah diperlukan verifikasi setelah penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah untuk memperkuat data sebelumnya dan dapat membuktikan kebenaran dari penarikan kesimpulan sehingga lebih kredibel.<sup>39</sup>

### **1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi**

Dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagi sumber.<sup>40</sup> Teknik pengumpulan data, peneliti akan menganalisis beragam data primer maupun sekunder untuk mendapatkan hasil yang valid dan kredibel.

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 252

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 241